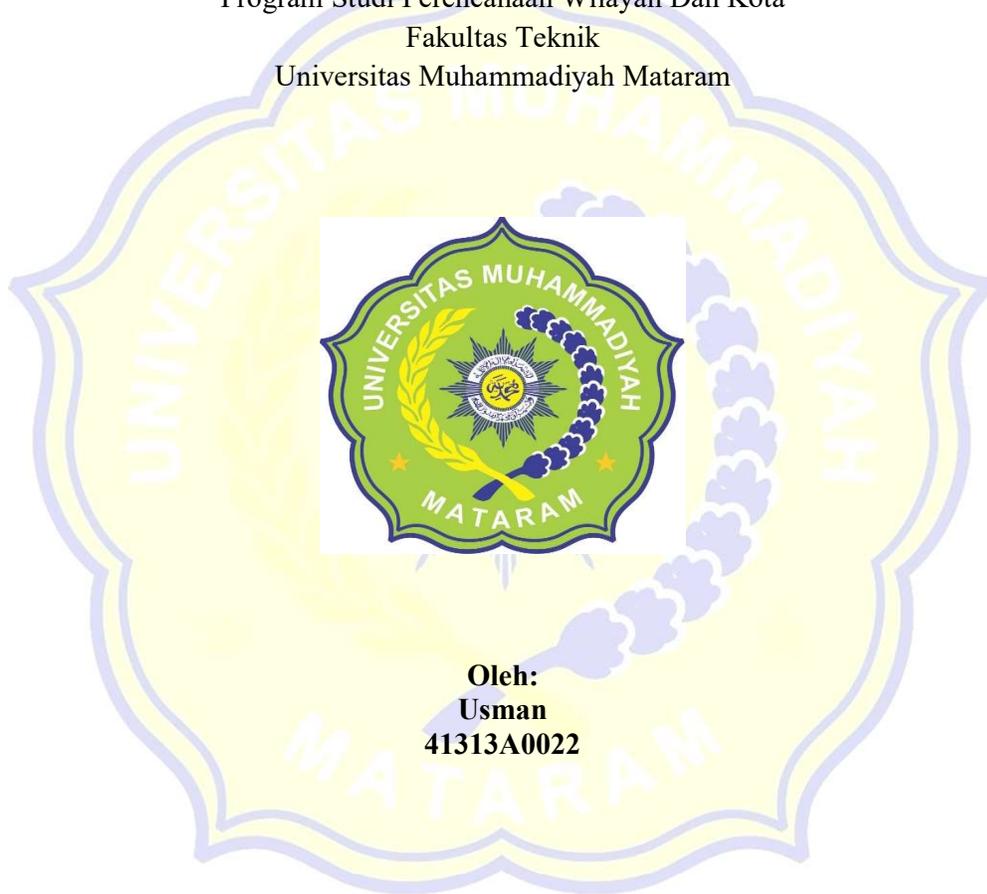


SKRIPSI

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI PERMUKIMAN
KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:
Usman
41313A0022

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021

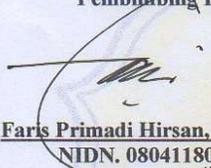
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI
STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI PERMUKIMAN
KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG

Disusun Oleh:

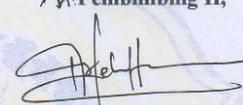
USMAN
41313A0022

Mataram, 11 Februari 2021

Pembimbing I,


Faris Primadi Hirsan, ST., MT
NIDN. 0804118001

A. Pembimbing II,


Laylan Jauhari, ST., M.URP
NIDN.0810039301

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK




Dekan,
Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT
NIDN.0824017501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

DI PERMUKIMAN KELURAHAN

PANCOR KECAMATAN SELONG

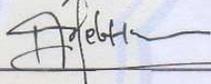
Yang Diperiapkan dan Disusun Oleh :

USMAN

41313A0022

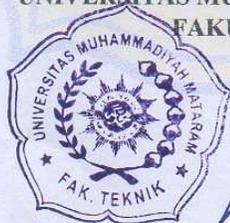
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Hari, Kamis, 11 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Tim Penguji

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|
| 1. Penguji I | : Fariz Primadi Hirsan, ST., MT |  |
| 2. Penguji II | : Sri Apriani Puji Lestari, ST., MT |  |
| 3. Penguji III | : Febrita Susanti, ST., M. Eng |  |

Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**



Dekan,



Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT
NIDN. 0824017501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman
Nim : 41313A0022
Program studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota
Judul : Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Di
Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong
Kabupaten Lombok Timur.

Penulis menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa skripsi dengan judul “ Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur”, ini benar - benar disusun dan ditulis oleh yang bersangkutan diatas, dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain dan diakui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Mataram 11 Februari 2021

Pembuat pernyataan



USMAN

NIM 41313A0022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN
NIM : 41313A0022
Tempat/Tgl Lahir : SUKARABA 31. Desember, 1991
Program Studi : TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Fakultas : TEKNIK
No. Hp/Email : usmanra@gmail.com / 087837828067
Judul Penelitian :-

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI PERMUKIMAN
KEURUM PANCOR kec. Belong

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 70% 60% 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20-03-2021

Penulis



USMAN
NIM. 41313A0022

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN
 NIM : 41313A0022
 Tempat/Tgl Lahir : SUKARAPA, 31 Desember 1991
 Program Studi : T. PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA
 Fakultas : TEKNIK
 No. Hp/Email : Usman.pwk@gmail.com / 087 837 82 80 67
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH & PERMUKIMAN
KELURAHAN PANCOR, KECAMATAN SELONG

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20-03-2021

Penulis



USMAN

NIM. 4131340022

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

BISMILLAHIRROHMAN NIRROHIM

Sujud syukur hamba pada-Mu Ya Rahman Ya Rahim, atas pertolongan, karunia, dan kekuatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lemah dan hina ini sehingga mampu berbuat dan berpikir. Semoga apa yang hamba lakukan bernilai ibadah disisi-Mu. Amin.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu (Q.S Al Insyirah : 6-8).

“MERANTAU”

Orang berilmu dan beradab tidak diam dikampung halaman (negeri sendiri). Tapi pergi jauh melangkah seperti orang asing dinegeri orang.

**Pendidikan adalah proses yang tidak kita tau menjadi mengetahuinya. Sumbernya guru dan tempat bukan hanya yang punya legalitas karena esensinya yang penting ilmunya.
belajar dan menuntut ilmu tidak mengenal usia.**

Perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mampu berbagi, bukan menikmatinya sendiri atau bahkan menyombongkan diri.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SubhanahuWata'ala, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Adapun tugas ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada Fakultas Teknik.

Mengingat masih banyak adanya kekurangan yang belum dapat dikatakan sempurna sehingga penyusun sangat mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Dengan penuh harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan segala kerendahan hati penyusun banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Febrita susanti, ST., M. Eng., selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Faris Primadi Hirsan, ST., MT. selaku dosen pembimbing utama, Laylan Jauhari, ST.,M.URP selaku dosen pembimbing kedua dalam menyusun tugas akhir ini
4. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan pembuatan Tugas Akhir ini.

ABSTRAK

Permukiman Kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. dalam mengatasi permukiman kumuh belum ada program yang mengatasi permukiman kumuh skala kawasan. Kemudian bagaimana strategi penanganan kawasan kumuh di kelurahan pancor kecamatan selong. Dengan mengkaji aspek kriteria Kawasan kumuh untuk mengetahui tingkat kekumuhan disertai beberapa analisis pendukung untuk penetapan Kawasan kumuh serta konsep penanganan Kawasan kumuh. Dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif data yang di butukan yaitu data primer dan data sekunder Untuk mendapatkannya Observasi lapangan, wawancara, dan telaah pustaka. Variable dan indikator yang digunakan berdasarkan kriteria permukiman kumuh ditinjau dari sisi fisik, dan kriteria permukiman kumuh di tinjau dari sisi non fisik, dengan menggunakan analisis kuantitatif dan pembobotan untuk mengetahui tingkat kekumuhan kawasan di lokasi penelitian selanjutnya untuk mengetahui strategi penanganannya menggunakan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT). Tingkat kekumuhan kawasan di lokasi penelitian dengan pembagian kawasan berdasarkan jumlah lingkungan dengan hasil analisisnya adalah tingkat kumuh sedang berada lingkungan Jorong dengan rekomendasi penanganan peremajaan lingkungan skala kawasan.

Kata Kunci : Kawasan, Pemukiman, Tingkat Kumuh,

ABSTRACT

Slum settlements are characterized as an unfit area for human habitation due to the irregularity of the buildings, the high density of the buildings, and the poor quality of the facilities, services, and infrastructure. There has never been a policy in place to deal with slum settlements on a wide scale. What is the proposal for coping with slum areas in Pancor and Selong sub-districts? By examining the slum area requirements for determining the slum level and several supporting analyses for slum area determination and the definition of slum area management. The data required for quantitative and qualitative research methods, namely primary and secondary data, gather information through field observations, interviews, and a study of the literature. The variables and metrics used are based on slum settlement criteria in terms of physical aspects. The slum settlement criteria are checked from a non-physical perspective, using quantitative analysis and weighting to assess the level of slum areas in the following study location to determine the handling approach using the Strengths, Limitations, Opportunities, and Threats analysis (SWOT). The number of environments divides the slum level of the city in the study location into regions. According to the results, the amount of slums around Jorong is in the middle grade. It is recommended for area-wide environmental rejuvenation.

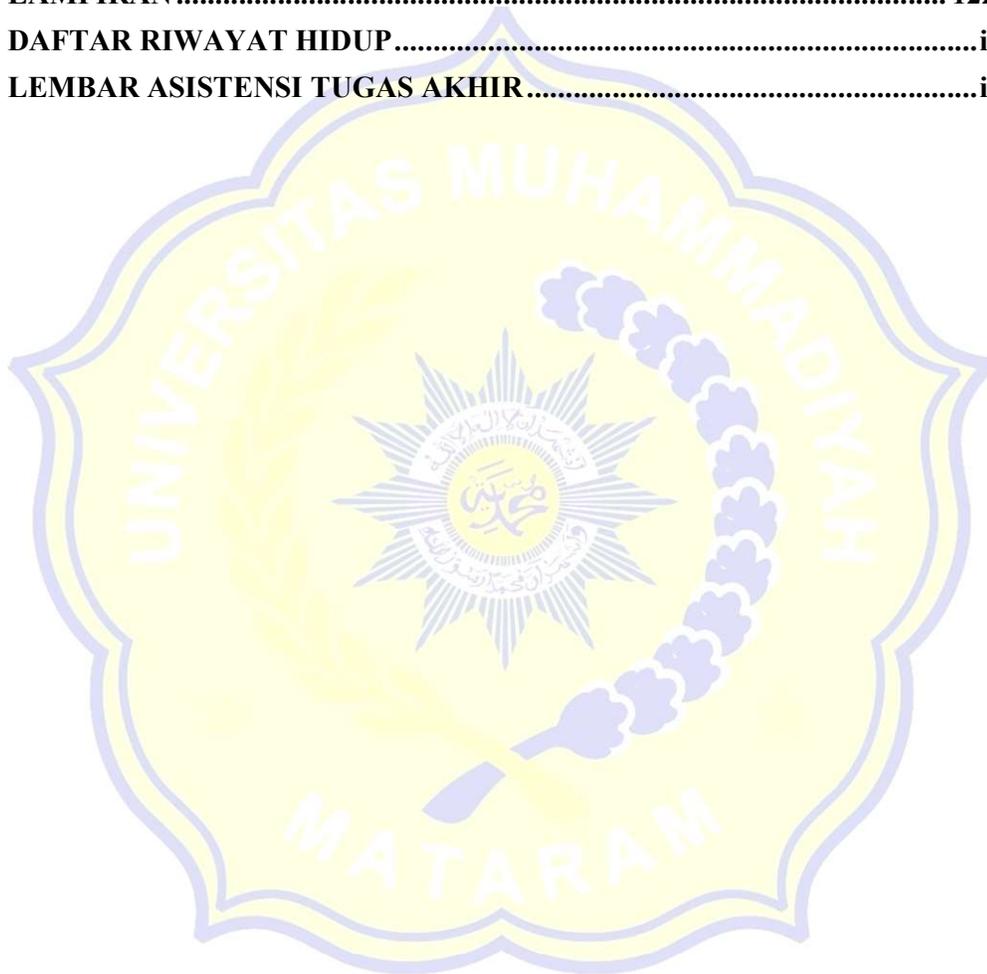
MENGESAHKAN
DUPLIKAT FOTOKOPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
P3B
Humaira, S.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumsan masalah.....	3
1.3. Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup Pembahasan.....	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Terminologi Judul	6
2.2. Tinjauan Teori.....	7
2.2.1 Permukiman	7
2.2.2 Permukiman Kumuh	8
2.2.3 Penyebab Tumbuhnya Permukiman kumuh.....	10
2.2.4 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh.....	11
2.2.5 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Tinjauan Kebijakann	17
2.3.1 UUD No. 1 Tahun 2011	17
2.3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Lokasi Penelitian.....	24
3.2. Jenis Penelitian.....	24
3.2.1. Penelitian kuantitatif	24
3.2.2. Penelitian kualitatif	25
3.3. Jenis Penelitian.....	25
3.3.1 Jenis Data	25
3.3.2 Sumber Data.....	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.1 Observasi Lapangan.....	27
3.4.2 Wawancara.....	27
3.4.3 Telaah Pustaka	28
3.4.4 Variabel dan Indikator	28
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	54
4.1. Letak Geografis Kelurahan	54
4.2. Kondisi Fisik Dasar	54
4.2.1. Kondisi Topografi.....	55
4.2.2. Kondisi Geologi	55
4.2.3. Kondisi Demografi.....	55
4.3. Penggunaan Lahan.....	63
4.4. Evaluasi Indikator Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Pancor	66
4.4.1. Kondisi Bangunan Hunian	66
4.4.2. Jalan Lingkungan	71
4.4.3. Kondisi Drainase Lingkungan.....	77
4.4.4. Air Minum.....	81
4.4.5. Air Limbah	87
4.4.6. Persampahan	92
4.4.7. Proteksi Kebakaran	97
4.5. HASIL PEMBAHASAN WILAYAH STUDI KELURAHAN PANCOR.....	102
4.5.1 Tingkat Kekumuhan Kawasan di Permukiman Kelurahan Pancor....	102
4.5.2 Konsep Pentaan Kawasan Permukiman Kumuh.....	113

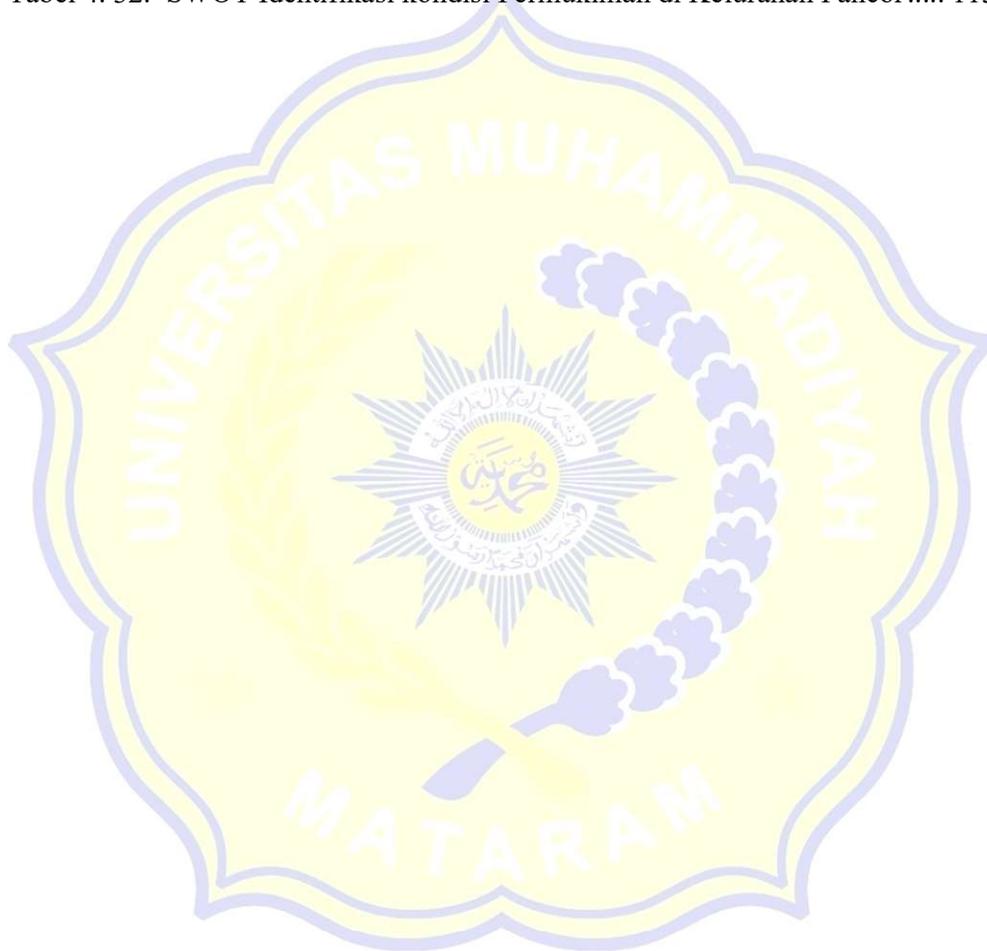
4.6. ANALISIS SWOT	114
4.6.1 Faktor Internal.....	114
4.6.2 Faktor eksternal.....	116
BAB V PENUTUP.....	120
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Saran	121
LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ii
LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR.....	ii



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Kondisi Kependudukan di Kelurahan	54
Tabel 4. 2. Kondisi Kependudukan di Kelurahan	57
Tabel 4. 3. Penggunaan Lahan Kelurahan Selong	61
Tabel 4. 4 Data Kondisi Bangunan Kelurahan Pancor	64
Tabel 4. 5. Kondisi Eksisting Bangunan Menurut Keteraturannya	67
Tabel 4. 6. Kepadatan Bangunan Kelurahan Pancor.....	68
Tabel 4. 7. Perizinan Bangunan di Kelurahan Pancor	69
Tabel 4. 8. Kondisi Jalan Lingkungan Kelurahan Pancor.....	70
Tabel 4. 9. Cakupan Layanan Jalan lingkungan Kelurahan Pancor.....	72
Tabel 4. 10. Persentase Kualitas Permukiman Jalan Rusak Kelurahan Pancor ...	74
Tabel 4. 11. Kondisi Drainase Lingkungan	75
Tabel 4. 12. Perbandingan Panjang Jalan dan Panjang Drainase.....	77
Tabel 4. 13. Persentase Drainase dengan kondisi rusak di Kelurahan Pancor.....	79
Tabel 4. 14. Kondis Air Minum.....	79
Tabel 4. 15. Kondis Air Minum.....	83
Tabel 4. 16. Cakupan Pelayanan Air Minum Kelurahan Pancor	84
Tabel 4. 17. Kondisi Air Limbah	85
Tabel 4. 18. Persyaratan Teknis MCK di Kelurahan Pancor	87
Tabel 4. 19. Cakupan Pelayanan Air Limbah Kelurahan Pancor	88
Tabel 4. 20. Kondisi Persampahan Kelurahan Pancor.....	90
Tabel 4. 21. Jumlah Rumah Tangga yang tidak memenuhi persyaratan teknis persampahan di Kelurahan Pancor	91
Tabel 4. 22. Cakupan pelayanan persampahan Kelurahan Pancor	93
Tabel 4. 23. Proteksi Kebakaran	95
Tabel 4. 24. Persyaratan teknis kebakaran Kelurahan Pancor	97
Tabel 4. 25. Cakupan pelayanan mitigasi bencana kebakaran Kelurahan Pancor	98
Tabel 4. 26. Analisis Pembobotan Kawasan Permukiman Kumuh Kriteria Indikator.....	104
Tabel 4. 27. Formula Penilaian Kawasan Kumuh	107

Tabel 4. 28. Penjabaran Formula Penilaian	110
Tabel 4. 29. Hasil Formula Penilaian (Skoring) Kawasan Kumuh Kelurahan Pancor	110
Tabel 4. 30. Model Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.....	111
Tabel 4. 31. Model Penanganan Kawasan Kumuh Lingkungan Kelurahan Pancor	112
Tabel 4. 32. SWOT Identifikasi kondisi Permukiman di Kelurahan Pancor.....	115



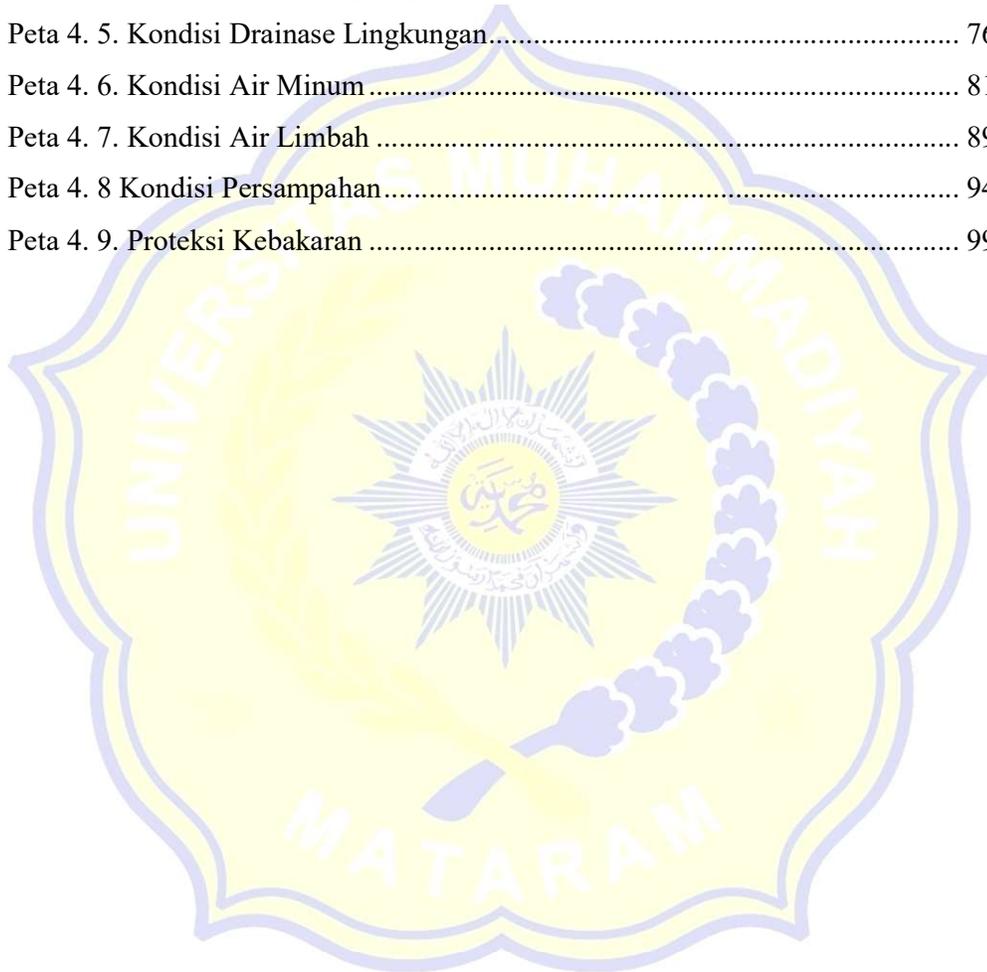
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Alur Penelitian.....	51
Gambar 4. 1. Grafik Kepadatan Penduduk	58
Gambar 4. 2. Grafik Penggunaan Lahan Kelurahan Selong	62
Gambar 4. 3. Penggunaan Lahan Kelurahan Selong.....	63



DAFTAR PETA

Peta 4. 1. Administrasi Kelurahan.....	59
Peta 4. 2. Kepadatan Penduduk Kelurahan.....	60
Peta 4. 3. Peta Keteraturan Bangunan.....	65
Peta 4. 4. Kondisi Jalan Lingkungan.....	71
Peta 4. 5. Kondisi Drainase Lingkungan.....	76
Peta 4. 6. Kondisi Air Minum.....	81
Peta 4. 7. Kondisi Air Limbah.....	89
Peta 4. 8 Kondisi Persampahan.....	94
Peta 4. 9. Proteksi Kebakaran.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman dan perumahan daerah-daerah di Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian, baik lingkungan perumahan dan permukiman yang di kota maupun desa. Banyak dijumpai pada kawasan permukiman yang padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan konsep 100 - 0 -100 mendukung penanganan permukiman kumuh tujuannya untuk meningkatkan kualitas hunian permukiman. Dengan upaya pendekatan yang menyeluruh berdasarkan apa yang pernah dikerjakan seperti pemugaran rumah, bantuan teknik rumah. perbaikan hingga penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Contohnya jalan lingkungan, saluran, sanitasi, MCK, bak sampah, air bersih. Walaupun demikian masih ada saja isu-isu kawasan kumuh permukiman menjadi masalah.

Permukiman Kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Seperti kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman dinilai dari kondisi fisik prasarana dan sarana lingkungan.

Menurut UN-Habitat (2004) faktor-faktor yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh di antaranya adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, dan kombinasi urbanisasi dan migrasi sebagai akibat dari perpindahan konflik antar penduduk. Turok dan Borel-Saladin (2016) menyatakan bahwa di banyak negara, populasi kumuh yang sedang tumbuh ini menceminkan pertumbuhan alami dan juga migrasi masuk. Pengaruh urbanisasi menjadi salah satu faktor penyebab kekumuhan.

Dengan isu masalah permukiman kumuh tersebut, bagaimana masyarakat dapat mengakses permukiman yang sehat, nyaman dan layak huni yang semestinya menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Ketika isu penyebab permukiman kumuh terus terjadi, masyarakat mengalami kondisi yang serba terbatas. Dan akibatnya warga yang mengalami hal tersebut akan kesulitan merubah keadaannya sendiri, dan tinggal di kawasan permukiman kumuh bukan atas kehendaknya.

Kelurahan Pancor yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Selong mendapatkan fungsi promosi pusat kegiatan wilayah provinsi (PKWp) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Lombok Timur. Sehingga dijadikan pusat kegiatan lokal perkotaan dilihat dari pola pergerakan aktifitas masyarakat lebih mengarah ke wilayah tersebut, dan didukung dengan sarana prasarana perdagangan dan jasa, fasilitas kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan yang memadai, namun fungsi kawasan secara makro permukiman masih mendominasi.

Dalam SK Kumuh Kabupaten Lombok Timur No: 188.45/466/PD/2020 Kelurahan Pancor merupakan salah satu dari 59 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dilihat dari masalah hunian, fasilitas, utilitas, sarana dan prasarana permukiman yang tidak memenuhi standar kualitas dan ketersediaannya.

Berdasarkan hasil observasi selain masalah pada kondisi bangunan hunian, masalah pada ketersediaan sarana dan prasarana terdapat kesalahan memfungsikan Sranan dan prasarana contohnya: masalah sanitasi, masih terdapat bangunan rumah yang belum memiliki kloset dan buangan limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase, irigasi dan sungai. Ketersediaan Infrastruktur jalan lingkungan, drainase dan pengolahan sampah yang tidak memenuhi kualitas,kapasitas, tidak berfungsi juga menjadi faktor penyebab menurunnya kualitas hunian di kawasan permukiman kelurahan pancor.

Beberapa program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menata lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Selong, merupakan proyek-proyek fisik dan non-fisik yang kegiatannya meliputi pemasangan paving block

pada jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, sosialisasi tentang limbah sanitasi, bantuan material untuk merenovasi beberapa rumah yang tidak layak huni, pelatihan peningkatan ekonomi (ekonomi kreatif) masyarakat.

Namun dari intervensi tersebut masih menyisakan ruas kumuh di permukiman Kelurahan Pancor. Karena dalam mengatasi permukiman kumuh belum ada program yang mengatasi permukiman kumuh skala kawasan, Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji tentang tingkat kekumuhan kawasan di Kelurahan Pancor serta merumuskan strategi penanganan untuk menuntaskan Kawasan kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.

1.2. Rumsan masalah

1. Bagaimana Tingkat Kekumuhan Kawasan Di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.
2. Bagaimana Strategi Penanganan Kawasan Di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.

1.3. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Tingkat Kekumuhan Kawasan Di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

1. Ruang Lingkup Materi

Dalam penelitian ini lingkup materi yang akan menjadi batas pembahasan berdasarkan fungsi kawasan permukiman. Pemetaan, penilain dan analisis kondisi sarana prasarana lingkungan-lingkungan kawasan permukiman berdasarkan kriteria permukiman kumuh. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan kawasan di permukiman kelurahan, penetapan kawasan kumuh dan mendapatkan lingkungan yang menjadi prioritas penanganan. Dan merumuskan strategi penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Kawasan permukiman Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dalam penelitian ini merupakan lingkup wilayah kajian .

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II; TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang teori-teori yang digunakan berdasarkan studi literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Penjelasan ini bersumber dari buku-buku referensi, jurnal dan hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan.

BAB III; METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, variable, indikator yang akan menjawab rumusan masalah teknik analisa data.

BAB IV; HASIL DAN PEMABAHASAN

Pada bab ini menjabarkan kondisi umum kawasan permukiman kelurahan pancor yang menjadi lokasi penelitian, membahas data dan pengolahan data

BAB V; PENUTUP

Pada Bab disini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dan analisis mengenai bagaimana tingkat kekumuhan di permukiman kelurahan pancor kecamatan selong kabupaten Lombok timur. Kesimpulan bagaimana rekomendasi dari hasil penilaian tingkat kekumuhan di kelurahan pancor kemudian strategi penanganannya. Dan saran dari peneliti mengenai rekomendasi berdasarkan hasil kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Terminologi Judul

Terminologi judul merupakan suatu pengertian tentang memahami suatu judul penelitian yang di ambil oleh seorang peneliti. Berikut adalah pemahaman tentang judul.

“Judul: Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong”

1. Strategi *Menurut Syafrizal*: strategi merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan dengan berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal dan internal.
2. Penanganan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penanganan: proses, cara pembuatan menangani; penggarapan.
3. Kawasan berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mendefinisikan kawasan adalah kawasan yang memiliki fungsi lindung atau budidaya
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 medefinisikan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni kerana ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1 Permukiman

A. Definisi Permukiman

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997).

B. Defisi kumuh

Pengertian Kumuh prasarana yang ada tidak sesuai, Kumuh adalah kesan atau gambaran standar yang berlaku, baik standar secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana dan penghasilan kelas menengah. Dengan air bersih, sanitasi maupun persyaratan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai kelengkapan prasarana jalan, ruang tanda atau cap yang diberikan golongan terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan, (Sri Kurniasih, diakses tanggal 10/10/2010).

C. Kawasan Kumuh

Wilayah kawasan kumuh menurut Bank Dunia (1999) merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Tumbuhnya kawasan kumuh terjadi karena tidak terbandungnya arus urbanisasi.

Kawasan kumuh menurut ILO 2008 dalam Edi Suharto 2009 : adalah tempat tinggal yang kumuh, pendapatan yang rendah dan tidak menentu, serta lingkungan

yang tidak sehat dan bahkan membahayakan dan hidup penuh resiko dan senantiasa dalam ancaman penyakit dan kematian.

Slum's merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Utomo Is Hadri, 2000). Slum's yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1985). Dalam kamus sosiologi Slum's yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan. (Sukanto Soerjono, 1985).

2.2.2 Permukiman Kumuh

A. Pengertian dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Rahardjo Adisasmita, 2010).

Sedangkan menurut Parsudi Suparlan, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut.

Pengertian lain dari permukiman kumuh juga diungkapkan oleh Johan Silas yaitu permukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Dan yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh, yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan.

B. Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Siswono Yudohusodo (1991) 11 dalam bukunya Rumah untuk seluruh Rakyat, mengemukakan lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, yaitu kurangnya atau tidak tersedianya prasarana, sarana, fasilitas lingkungan. Walaupun ada, kondisinya sangat buruk dan di samping itu, tata letak bangunan tidak teratur;
- Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan bangunan yang bersifat semi permanen;
- Kepadatan bangunan dengan KDB yang besar dari yang diijinkan, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 500 jiwa per ha); dan
- Fungsi-fungsi kota yang bercampur dan tidak beraturan.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangannya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.

- b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
 6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

2.2.3 Penyebab Tumbuhnya Permukiman kumuh

Faktor yang berpengaruh dalam turunnya kualitas permukiman adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah; lingkungan fisik, biologi, sosial dan budaya setempat yang belum mendukung tingkat kemajuan teknologi pembangunan perumahan masih terbelakang serta belum konsistennya kebijaksanaan pemerintah dalam tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat (Keman 2005).

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (slum) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung (Hariyanto, 2008). Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB). Faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus (MCK), pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan. Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-

faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat.

2.2.4 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, sesungguhnya, tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya. Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu:

- a) Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah rumah juga dapat berupa perubahan atau penambahan terhadap rumahnya. Jadi penghuni secara aktif menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan sebagai *housing adjustment* (Moris, 1977).
- b) Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau diistilahkan sebagai *housing adaptation*.

2.2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Thn	Judul/Thn	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dina margaretha asa (2015)	Penanganan permukiman kumuh di kelurahan panggungrejo kota pasuruan	Deskriptif Kuantitatif	1. Karakter fisik 2. tingkat kekumuhan permukiman 3. penanganan yang mampu mengatasi masalah permukiman kumuh	<p>Karakteristik permukiman kumuh setiap RW yang ada di Kelurahan Panggungrejo, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Air bersih masih menjadi permasalahan yang serius, Tingkat pendapatan yang tidak menentu, memerlukan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UKM-UKM, Masih terdapat rumah-rumah yang dibangun di sempadan pantai. Penilaian tingkat kekumuhan di lokasi penelitian berdasarkan aspek fisik bangunan.</p> <p>Hasil analisa prospektif partisipatif menunjukkan lima variabel penggerak yang paling mempengaruhi kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo yaitu variabel tingkat pendidikan, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan</p>

					bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur publik, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai.
2	Murtanti Jani Rahayu (2007)	Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh Kasus Permukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucangsawit, Surakarta	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. aspek lingkungan fisik, 2. sosial, dan ekonomi. 3. Strategi dalam perencanaan 	<p>Ciri fisik yang tampak adalah lingkungan padat, ketersediaan lahan dan kebutuhan akan perumahan tidak seimbang; luasan tiap rumah rata-rata 20 m², didominasi oleh rumah non permanen.</p> <p>Jumlah penghuni permukiman bantaran Sungai Bengawan Solo ini sebanyak 347 KK. Sebagian besar penduduk (90 %) bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh industri, dan sebagian besar perempuan tidak bekerja. Di lingkungan ini terdapat beberapa industri rumah tangga (roti dan plastik) yang belum berkembang. Jenis pekerjaan sebagian besar masyarakat sebagai buruh, baik itu</p>

					<p>buruh bangunan maupun industri. Usaha lain untuk menunjang perekonomian keluarga adalah memelihara hewan ternak berupa kambing.</p> <p>menentukan strategi yang nantinya diharapkan menjadi bagian dari agenda perencanaan pembangunan tahunan kota dan perencanaan pembangunan jangka menengah ataupun perencanaan pembangunan jangka panjang kota.</p>
3	Iwan Kustiwan (2019)	Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung	<p>Pendekatan Spasial (Teknik overlay data spasial, Pendekatan Kuantitatif (statistik deksriptif, teknik skoring),</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pola sebaran kampung dan sebaran permukiman kumuh di wilayah studi 2. Identifikasi karakteristik fisiklingkungan 	<p>Kampung di Indonesia telah memegang peran penting dalam proses pembangunan kota. Sebagai salah satu bentuk dari permukiman informal, saat ini kawasan kampung masih menjadi tumpuan khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan hunian.</p> <p>Pemerintah perlu menempatkan kampung kota sebagai bagian integral dari sistem</p>

		<p>pendekatan Kualitatif</p> <p>Analisis Isi</p> <p>Analisis SWO</p>	<p>serta karakteristik sosial-ekonomi</p> <p>3. Perumusan strategi peningkatan kualitas lingkungan kampung kota dalam rangka mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan</p>	<p>perencanaan kota. Legalitas dan kepastian hukum terhadap eksistensi kampung kota juga perlu dijamin melalui perencanaan yang terintegrasi tanpa memarjinalkan kawasan kampung dalam penataan ruang kota.</p> <p>Atas dasar urgensi keberadaan kampung kota sebagai elemen kota, serta melihat masih terbatasnya studi-studi terdahulu terkait kampung kota, penelitian ini telah merumuskan beberapa rekomendasi dan alternatif berupa strategi peningkatan kualitas lingkungan kampung kota dalam rangka mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan</p>
--	--	--	--	--

2.3 Tinjauan Kebijakann

2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011

Konsep penanganan permukiman kumuh mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali (Pasal 97 ayat 1):

1. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; dan
3. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

1. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha;
2. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalan sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actors); dan
3. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat

Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
2. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
3. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha.
4. Capacity building meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.

Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima” Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif
2. Partisipasi Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Program Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.
3. Kolaborasi Dan Komprehensif.
Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu
4. Terintegrasi Dengan Sistem Kota Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota , serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman

Menjamin Keamanan Bermukim Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

2.3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kemudian Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh, meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. Mengenai kriteria-kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh dijelaskan lebih rinci pada Bab II kriteria dan tipologi bagian pertama, dari pasal 4 sampai pasal 12:

1) Kriteria kekumuhan ditinjau bangunan gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

c. Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud:

- pengendalian dampak lingkungan
- pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum
- keselamatan bangunan gedung
- kesehatan bangunan gedung
- kenyamanan bangunan gedung; dan
- kemudahan bangunan gedung.

2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman. merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk, merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Ketidakterediaan akses aman air minum

Ketidakterediaan akses aman air minum yang dimaksud merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku maksudnya merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup:

a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan maksudnya merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

b. Ketidakterediaan drainase

Ketidakterediaan drainase maksudnya merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan maksudnya merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya maksudnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- Pemeliharaan rutin; dan/atau
- Pemeliharaan berkala.

e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk maksudnya merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud mencakup:

a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku maksudnya merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat

b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis maksudnya merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

- Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;
- Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana yang dimaksud:

a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

- b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud mencakup ketidaktersediaan:

a. Prasarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

- Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan
- Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran
- Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
- Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

b. Sarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud antara lain terdiri dari:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- kendaraan pemadam kebakaran
- mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
- peralatan pendukung lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Selong, lebih khususnya berada di lima lingkungan Kelurahan Pancor lima lingkungan tersebut lingkungan Dayan Masid, Lingkungan Lauq Masjid, Lingkungan Bermi, Lingkungan Jorong, dan Lingkungan Muhajirin. Kelurahan Pancor merupakan salah satu dari 59 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang mendapatkan SK Kumuh Kabupaten Lombok Timur berdasarkan keputusan Bupati No: 188.45/466/PD/2020

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian memerlukan beberapa cara atau metode dalam melakukan analisis sehingga hal tersebut menjadi suatu cara untuk mencapai tujuan penelitian, beberapa cara tersebut diantaranya yaitu metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif secara berurutan, dimana pada tahap pertama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Metode dengan model ini digunakan untuk menemukan hipotesis dan sekaligus membuktikan validitas eksternal hipotesis tersebut (Sugiyono, 2012). Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan laporan ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif:

3.2.1. Penelitian kuantitatif

Metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, metode ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dalam metode deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menentukan kekumuhan di kawasan permukiman di kelurahan pancor, dimana

menggunakan teknik skoring yang telah ditetapkan dengan masing-masing kriteria permukiman kumuh.

3.2.2. Penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau jawaban pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan data-data yang ada sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi yang tengah terjadi di lapangan. Pada penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif di gunakan pada analisis strategi penanganan kawasan kumuh permukiman.

3.3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hal yang perlu dipersiapkan adalah menyusun jenis data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan yang diharapkan peneliti

3.3.1 Jenis Data

Kebutuhan akan data berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, data kuantitatif dan data kualitatif.

- a. Data kuantitatif adalah data yang menerangkan kondisi eksisting lokasi penelitian dengan tabulasi angka sehingga bisa dikalkulasikan untuk mengetahui nilainya dengan angka. Data kuantitatif yang dimaksud adalah:
 - 1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan jumlah kepala rumah tangga
 - 2) Data jumlah ketersediaan saran dan prasarana
 - 3) Data jumlah kepala keluarga yang sudah menggunakan air bersih
 - 4) Data jumlah rumah hunian yang sesuai IMB (persyaratan administrasi bangunan)
 - 5) Data jumlah bangunan yang sesuai status (legal atau ilegal)

- b. Data kualitatif adalah jenis data yang penjelasannya bukan dengan angka akan tetapi penjelasannya dengan mendeskripsikan keadaan lokasi penelitian secara umum. Data kualitatif yang di maksd sebagai berikut:
- 1) Data Kondisi fisik wilayah, yang mencakup letak geografis, kondisi topografi, kelerengan, geologi dan hidrologi.
 - 2) Data Pola penggunaan lahan, mencakup pola penggunaan lahan Kelurahan Pancor.
 - 3) Data Karakteristik Wilayah Permukiman yaitu
 1. Aspek Fisik berupa kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan kebakaran.
 2. Aspek non fisik berupa nilai strategis lokasi, potensi sosial ekonomi, dukungan, masyarakat, komitmen pemda.
 3. Aspek legalitas lahan berupa status tanah, kesesuaian Rencana Tata Ruang dan persyaratan izin mendirikan bangunan (IMB).

3.3.2 Sumber Data

Untuk mengetahui sumber data dari mana data bias diperoleh dapat diketahui berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

- a. Untuk data primer yaitu diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan observasi langsung di lapangan. Contohnya seperti:
 - 1). Pengamatan langsung berupa kondisi bangunan, sarana dan prasarana
 - 2). Wawancara kepemilikan izin bangunan (IMB), status tanah dan dukungan masyarakat.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait .data sekunder bisa juga diperoleh dari hasil kajian literatur yang terkaitan dengan judul lokasi dan judul pembahasan. Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian laporan ini antara lain:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur dapat diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Status tanah dan IMB dapat diperoleh dari Dinas Pertanahan.
- 3) Keberadaan dan kondisi saluran dan pengolahan air limbah dapat diperoleh dari UPTD pengelolaan air limbah
- 4) Data kependudukan dapat diperoleh dari Kantor Kelurahan Pancor
- 5) Data kondisi Fisik Dasar kawasan permukiman dapat diperoleh dari Kantor Kelurahan Pancor
- 6) Data kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diperoleh dari Kantor Kelurahan Pancor
- 7) Data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dapat diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Lombok Timur

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tepat waktu guna untuk efisiensi waktu dan materi. Namun tetap sesuai yang diinginkan peneliti, maka dibutuhkan teknik dalam mengumpulkan data, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

3.4.1 Observasi Lapangan

Kelebihan dari teknik pengumpulan dengan observasi langsung ke lapangan lokasi penelitian adalah data yang diperoleh lebih akurat, dan dapat menyesuaikan data yang diperoleh dari instansi dengan keadaan sebenarnya.

3.4.2 Wawancara.

Hal ini dilakukan dengan maksud mendengarkan tanggapan masyarakat maupun pihak lain yang memiliki kepentingan di lokasi penelitian, tentang daerah atau wilayah survey seperti Aspek vitalitas ekonomi dan komitmen pemerintah.

3.4.3 Telaah Pustaka

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber – sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar atau jurnal.

3.4.4 Variabel dan Indikator

Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, variabel penelitian adalah hal-hal yang akan kita teliti.

Indikator adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebuah indikator tidak selalu menggambarkan keadaan secara keseluruhan tetapi seringkali hanya memberi petunjuk tentang keadaan keseluruhan tersebut.

Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai identifikasi kawasan kumuh di Kelurahan Pancor dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 3. 1. Variabel Penelitian

	variabel	Sub Variabel	Indikator	Analisis
1	Kriteria permukiman kumuh	1. Kondisi Bangunan	a. Kondisi Bangunan	ANALISA KUANTITATIF
			b. Kepadatan Bangunan	
			c. Persyaratan	
		2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	
			b. Kualitas Jalan	
		3. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	
			b. Kualitas	
		4. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Persyaratan Teknis	
			b. Cakupan Pelayanan	
		5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Persyaratan Teknis	
			b. Cakupan Pelayanan	
		6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Persyaratan Teknis	
			b. Cakupan Pelayanan	
		7. Kondisi Pengamanan Kebakaran	a. Persyaratan Teknis	

			b.Cakupan Pelayanan	
2	Strategi penanganan	1. Identifikasi Kondisi Non Fisik	a.Nilai Strategis	ANALISA DESKRIFTIF KUALITATIF
			b.Kepadatan Penduduk	
			c.Potensi Sosial Ekonomi	
			d.Dukungan Masyarakat	
			e.Komitmen Pemda	
		2. Legalitas Lahan	a.Status Lahan	
			b.Kesesuaian RTR	



3.5. Teknik Analisis Data

Data sudah didapatkan selanjutnya dianalisis, hasil dari analisa untuk menilai kondisi sub-sub variable dan indikator yang menjadi kriteria bagian-bagian dari kawasan kumuh permukiman, yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Analisis yang digunakan yaitu:

3.5.1 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang di maksud dalam penyusunan laporan penelitian ini penilaian data dengan angka dengan analisis pembobotan tujuannya untuk mendapatkan atau mengetahui tingkat kekumuhan kawasan dan pemilihan lingkungan yang akan dijadikan prioritas penanganan.

3.5.2 Analisa Tingkat Kekumuhan kawasan

Analisa yang digunakan untuk mencari nilai tingkat kekumuhan kawasan adalah analisa pembobotan, sumber dan teknik penilaian berdasarkan pedoman teknis Dirjen Perumahan dan permukiman (peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh)

1. Penilaian Tingkat Kekumuhan

a. Kondisi Bangunan

1) Tingkat Keteraturan Bangunan

- 76%-100% Tingkat Keteraturan bangunan (penilaian Bobot 5)
- 51%-75% Tingkat Keteraturan bangunan (penilaian Bobot 3)
- 25%-50% Tingkat Keteraturan bangunan (penilaian Bobot 1)

2) Kepadatan Bangunan

- Tingkat Kepadatan Bangunan Sebesar >300 Unit/Ha (Penilaian Bobotnya 5)
- Tingkat Kepadatan Bangunan Sebesar 299-251 Unit/Ha (Penilaian Bobotnya 3)
- Tingkat Kepadatan Bangunan Sebesar <250 Unit/Ha (Penilaian Bobotnya 1)

3) Persyaratan Teknis

- 76% - 100% Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (Penilaian Bobot 5)
- 51% - 75% Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (Penilaian Bobot 3)
- 25% - 50% Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (Penilaian Bobot 1)

b. Kondisi Jalan Lingkungan

1) Cakupan Layanan

- Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot 1)

2) Kualitas Jalan

- Kualitas Jalan Buruk pada 76%-100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- Kualitas Jalan Buruk pada 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- Kualitas Jalan Buruk pada 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot 1)

c. Kondisi Drainase Lingkungan

1) Persyaratan Teknis

- Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot 1)

2) Cakupan Pelayanan

- 76%-100 % Luas Area Tidak Terlayani Drainase Lingkungan (Nilai Bobot 5)

- 51% -75% Luas Area Tidak Terlayani Drainase Lingkungan (Nilai Bobot 3)
- 25% -50% Luas Area Tidak Terlayani Drainase Lingkungan (Nilai Bobot 1)

d. Kondisi Penyediaan Air Minum

1) Persyaratan Teknis

- SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1)

2) Cakupan Pelayanan

- Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 76% - 100% populasi (Nilai Bobot 5)
- Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 75% populasi (Nilai Bobot 3)
- Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi (Nilai Bobot1)

e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

1) Persyaratan Teknis

- Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1)

2) Cakupan Layanan

- Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 76%- 100% populasi (Nilai Bobot 5)

- Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 51%- 75% populasi (Nilai Bobot 3)
- Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi (Nilai Bobot1)

f. Kondisi Pengelolaan Persampahan

1) Persyaratan Teknis

- Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 76% -100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1)

2) Cakupan Pelayanan

- Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai terhadap 76% - 100% Populasi (Nilai Bobot 5)
- Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai terhadap 51% - 75% Populasi (Nilai Bobot 3)
- Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai terhadap 25% - 50% Populasi (Nilai Bobot1)

g. Kondisi Pengamanan Kebakaran

1) Persyaratan Teknis

- Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1)

2) Cakupan Pelayanan

- Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)

- Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
 - Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1)
- h. Nilai Strategis Lokasi
- 1) Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah (Nilai Bobot 5)
 - 2) Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah (Nilai Bobot1)
- i. Kepadatan Penduduk
- Untuk Kota Metro & Kota Besar
- 1) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >750 Jiwa/Ha (Nilai Bobot 5)
 - 2) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 401 - 749 Jiwa/Ha (Nilai Bobot 3)
 - 3) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha (Nilai Bobot1)
- j. Potensial Sosial Ekonomi
- 1) Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan (Nilai Bobot 5)
 - 2) Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan (Nilai Bobot1)
- k. Dukungan Masyarakat
- 1) Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi (Nilai Bobot 5)
 - 2) Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan rendah (Nilai Bobot1)
- l. Komitmen Pemda
- 1) Komitmen Penanganan Oleh Pemda Tinggi tinggi (Nilai Bobot 5)
 - 2) Komitmen Penanganan Oleh Pemda Rendah (Nilai Bobot1)
- m. Status Tanah
- 1) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal) (Nilai Bobot +1)

- 2) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara, milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan maupun tanah sengketa (status tanah ilegal atau squatters) (Nilai Bobot -1)
- n. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR)
- 1) Keseluruhan lokasi permukiman dengan sesuai peruntukan Zona Permukiman Rencana Tata Ruang (Nilai Bobot +1)
 - 2) Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak sesuai pada Zona Permukiman sesuai Rencana Tata Ruang (Nilai Bobot -1)
- o. Persyaratan Administrasi Bangunan
- 1) Seluruhan Bangunan pada lokasi telah memiliki IMB (Penilaian Bobotnya +1)
 - 2) Sebagian atau seluruh bangunan pada lokasi belum memiliki IMB (Penilaian Bobotnya -1)

3.5.3 Teknik Penilaian

1. Lokasi

a) Legalitas Tanah

Status legalitas tanah adalah perbandingan jumlah rumah yang dibangun di atas tanah/lahan yang diperuntukkan bukan sebagai perumahan dibandingkan dengan bangunan pada tanah yang diperuntukkan bagi perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Semakin luas suatu permukiman berada di atas lahan yang tidak diperuntukkan bagi permukiman, maka tingkat kekumuhannya semakin tinggi.

Teknik penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Luas Permukiman Pada Peruntukan Bukan Perumahan}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$$

b) Status Penguasaan Bangunan

Status penguasaan bangunan adalah status pemilikan dan penggunaan bangunan. Semakin banyak penduduk di suatu permukiman

yang menguasai bangunan bukan milik sendiri, yaitu dengan cara sewa atau kontrak, tingkat permasalahan kumuh dari segi penguasaan bangunan semakin tinggi. Perhitungan status penguasaan bangunan adalah perbandingan antara jumlah KK yang menempati bangunan dengan cara sewa/kontrak dengan jumlah seluruh KK yang ada pada permukiman yang akan dinilai. Adapun teknik penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah KK dengan cara menyewa/kontrak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

c) Frekuensi Bencana Kebakaran

Frekuensi bencana kebakaran adalah banyaknya kejadian kebakaran pada suatu lingkungan permukiman. Semakin sering terjadi bencana kebakaran pada suatu lingkungan permukiman, tingkat kerawanan bencana di lingkungan tersebut semakin tinggi dan sarana dan prasarana fisiknya buruk. Perhitungan frekuensi bencana kebakaran dinilai dari banyaknya kejadian selama 1 (satu) tahun pada suatu wilayah atau lingkungan permukiman. Adapun teknik penilaiannya adalah Jumlah Kejadian Kebakaran selama dalam satu tahun.

2. Kependudukan

a) Tingkatan Kepadatan Penduduk

Tingkat Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas wilayah administrasi tertentu. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin terhadap sumber daya dan daya dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut. Adapun perhitungan pada tingkat kepadatan penduduk adalah dengan membandingkan banyaknya penduduk dengan luas wilayah administrasi kelurahan (Ha). Teknik Penilaian adalah:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk dalam suatu wilayah}}{\text{Jumlah luas wilayah (Ha)}} \times 100\%$$

b) Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Rata-rata anggota rumah tangga atau besarnya anggota rumah tangga adalah rata-rata banyaknya anggota keluarga pada tiap-tiap kepala keluarga (KK). Anggota rumah tangga ini menunjukkan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan KK tersebut. Semakin besar rata-rata ukuran rumah tangga menunjukkan semakin besarnya tingkat konsumsi barang maupun jasa pada keluarga tersebut, misalnya konsumsi listrik dan air akan lebih besar pada keluarga yang memiliki ukuran keluarga yang lebih besar. Perhitungan rata-rata anggota rumah tangga dinilai dengan membandingkan jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah seluruh KK. Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk dalam suatu wilayah}}{\text{Jumlah seluruh kk}} \times 100\%$$

c) Jumlah Kepala Keluarga per Rumah / Bangunan

Jumlah KK perumahan adalah perbandingan antara jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Semakin tinggi angka perbandingan KK dengan bangunan rumah ini menunjukkan semakin banyak jumlah anggota keluarga, yang pada gilirannya berpengaruh pada kebutuhan sarana pelayanan yang semakin besar. Perhitungan jumlah KK per rumah / bangunan adalah perbandingan jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah rumah pada wilayah tersebut. Teknik penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah KK dalam suatu wiayah}}{\text{Jumlah bangunan rumah}} \times 100\%$$

d) Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk tiap tahun pada suatu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun tiap 1000 penduduk. Perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk membandingkan jumlah pertumbuhan penduduk dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100% Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk tahun akhir}-\text{jumlah penduduk tahun awal}}{\text{Jumlah penduduk tahun awal}} \times 100\%$$

3. Kondisi Bangunan

1) Tingkat Kualitas Struktur Bangunan

Kualitas struktur bangunan yang dimaksud terkait dengan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan bangunan khususnya rumah tinggal. Tingkat kualitas stuktur bangunan adalah persentase banyaknya bangunan rumah yang tidak memenuhi persyaratan pondasi, dinding, rangka, atap, serta lantai bangunan rumah tinggal yang sehat. Semakin banyak rumah dalam suatu permukiman yang tidak memenuhi kriteria kebutuhan minimal keselamatan dan keamanan mengindikasikan kondisi lingkungan permukiman semakin kumuh .Teknik penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah bangunan rumah dengan struktur tidak layak}}{\text{Jumlah keseluruhan bangunan rumah}} \times 100\%$$

2) Tingkat Kepadatan Bangunan

Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah unit bangunan per satuan luas (Ha) dalam suatu kawasan permukiman .Suatu kawasan permukiman menjadi kumuh salah satunya adalah disebabkan oleh tingkat kepadatan bangunan yang tinggi disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia. Perhitungan tingkat kepadatan bangunan adalah membandingkan jumlah

bangunan rumah yang ada dengan luas lahan permukiman dalam suatu wilayah. Teknik Penilaiannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan rumah}}{\text{Jumlah wilayah (Ha)}} \times 100\%$$

3) Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan

Tingkat penggunaan luas lantai bangunan adalah luas ruang yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi dan budaya setiap orang. Mengingat banyaknya jumlah rumah dan terbatasnya luas lahan pada permukiman kumuh, pada umumnya ruang aktivitas per orang sangat kecil. Hal ini menimbulkan terjadinya interaksi yang sangat tinggi antara orang dalam permukiman. Kriteria permukiman kumuh mengacu pada pedoman umum rumah sederhana sehat adalah luas lantai kurang dari 9 meter persegi setiap orang. Perhitungantingkat penggunaan luas lantai bangunan ialah membandingkan luas lingkungan rumah dengan jumlah penghuni rumah. Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Luas lingkungan rumah}}{\text{Jumlah penghuni rumah}}$$

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

1) Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dilihat dari besarnya pendapatan penduduk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu kawasan permukiman. Dalam hal ini kriteria dasar yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMP/UMK) Lemahnya sumber daya masyarakat juga diindikasikan dari banyaknya penduduk dengan penghasilan di bawah UMP/UMK. Perhitungan tingkat pendapatan penduduk dalam suatu kawasan adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan penghasilan di bawah UMP / UMK dengan

jumlah penduduk keseluruhan dikalikan dengan 100 %.. Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berpenghasilan di bawah UMP/UKM}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$$

2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dilihat dari persentase jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah tingkat pendidikan dalam kategori tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar sembilan tahun dengan keseluruhan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 %. Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang tidak tamat pendidikan SD 9 tahun}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk}} \times 100\%$$

3) Tingkat Kerawanan Keamanan

Tingkat kerawanan keamanan adalah banyaknya kejadian tindak kejahatan pada suatu kawasan permukiman. Semakin sering terjadinya tindak kejahatan pada suatu kawasan permukiman dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kekumuhan permukiman. Perhitungan tingkat kerawanan keamanan dinilai dari banyaknya kejadian tindak kejahatan dalam satu tahun pada suatu wilayah. Adapun teknik penilaiannya adalah jumlah Kejadian Tindak Kejahatan dalam satu tahun.

5. Prasarana

1) Kondisi Jaringan Jalan

Kondisi ketersediaan jalan sangat menentukan baik tidaknya transportasi dalam suatu lingkungan perumahan dan permukiman dan untuk mengetahui sebagian besar kondisi jalan lingkungan yang ada memadai atau tidak dilalui oleh kendaraan maka digunakan teknik penilaiannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total panjang jalan yang ruak}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$$

2) Kondisi Jaringan Drainase

Untuk mengetahui cakupan pelayanan jaringan drainase yang ada memadai atau tidak memadai terhadap luas area digunakan teknik penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{panjang drainase}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kondisi jaringan drainase di lokasi kajian maka teknik penilaiannya :

$$\frac{\text{panjang drainase permanen}}{\text{Total panjang drainase}} \times 100\%$$

3) Kondisi Pengelolaan Air Minum

Untuk mengukur cakupan pelayanan penyediaan air minum yang ada memadai atau tidak memadai terhadap populasi dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah populasi yang terlayani}}{\text{Jumlah populasi}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat pelayanan air minum dari segi kelancaran dapat digunakan teknik penilaian yaitu :

$$\frac{\text{Tingkat kelancaran yang terjadi}}{\text{Tingkat kelancaran ideal}} \times 100\%$$

4) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk mengukur sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau memenuhi persyaratan, baik sistem pengelolaan air limbah setempat

secara individual atau komunal; maupun sistem pengolahan air limbah terpusat maka dapat digunakan teknik penilaian.

$$\frac{\text{Jumlah kamar mandi sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

Untuk mengukur cakupan pelayanan pengolahan air limbah yang ada memadai atau tidak memadai terhadap populasi maka teknik penilaian sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kamar mandi}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

5) Pengelolaan Persampahan

Untuk cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang ada tidak memadai atau memadai terhadap populasi

$$\frac{\text{Jumlah populasi yang terlayani}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

6) Pengamanan Kebakaran

Untuk mengukur sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai atau memadai untuk mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter.

Tabel 3. 2. Kriteria dan Indikator Penilaian

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	JUMLAH
A. Identifikasi Permasalahan Kekumuhan				
1. Kriteria Bangunan	A. Keteraturan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Keteraturan bangunan 76% - 100% • Tingkat keteraturan bangunan 51% - 75% 	5 3	
	B. Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Bangunan sebesar >300 Unit/Ha • Kepadatan Bangunan sebesar 299-251 Unit/Ha • Kepadatan Bangunan sebesar <250 Unit/Ha 	5 3 1	
	C. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis sebesar 76%-100% • Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis sebesar 51%-75% 	5 3	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • 76%- 100% luas area tidak terlayani jalan lingkungan • 51% - 75% luas area tidak terlayani jalan lingkungan 	5 3	
	B. Kualitas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas permukaan jalan rusak sebesar 76%- 100% dari total panjang jalan lingkungan • Kualitas permukaan jalan rusak sebesar 51% - 75% dari total panjang jalan lingkungan. 	5 3	

3. kondisi drainase lingkungan	A. cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • 76%- 100% drainase tidak tersedia dari total panjang jalan lingkungan • 51 %-75% drainase tidak tersedia dari total panjang jalan lingkungan 	5	
	B. kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas drainase rusak sebesar 76%- 100% dari total panjang drainase lingkungan • Kualitas drainase rusak sebesar 51 %-75% dari total panjang drainase lingkungan 	5	
4. Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air minum tidak memenuhi persyaratan teknis sebesar 76%-100% dari jumlah pengguna air non PDAM • Sumber air minum tidak memenuhi persyaratan teknis sebesar 51%-75% dari jumlah pengguna air non PDAM 	5	
	B. Cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga tidak terpenuhi air minum sebesar 76%-100% dari pengguna air non PDAM • Jumlah rumah tangga tidak terpenuhi air minum sebesar 51%-75% dari pengguna air non PDAM 	3	
5. kondisi pengelolaan air limbah	A. Persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah MCK yang tidak sesuai persyarata teknis sebesar 76%-100% dari total jumlah MCK • Jumlah MCK yang tidak sesuai persyarata teknis sebesar 51%-75% dari total jumlah MCK 	5	
	B. Cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang tidak memiliki MCK sebesar 76%-100% dari total jumlah bangunan • Jumlah yang tidak memiliki MCK sebesar 51%-75% dari total jumlah bangunan 	3	

			3	
6. kondisi pengelolaan persampahan	A. Persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga tidak memenuhi persyaratan teknis sebesar 76%-100% dari total jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga tidak memenuhi persyaratan teknis sebesar 51%-75% dari total jumlah rumah tangga. 	5 3	
	B. Cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga dengan pengangkutan sampah lebih dari 2x seminggu sebesar 76%-100% dari total jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga dengan pengangkutan sampah lebih dari 2x seminggu sebesar 51%-75% dari total jumlah rumah tangga 	5 3	
7. kondisi pengamanan kebakaran	A. Persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah jalan lingkungan kurang dari 3,5 m sebesar 76%-100% dari total panjang jalan lingkungan Jumlah jalan lingkungan kurang dari 3,5 m sebesar 51%-75% dari total panjang jalan lingkungan 	5 3	
	B. Cakupan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Luas permukiman tidak terlayani mobil damkar sebesar 76%-100% dari total luas permukiman Luas permukiman tidak terlayani mobil damkar sebesar 51%-75% dari total luas permukiman 	5 3	
B. Identifikasi Pertimbangan Lain (Dapat Ditentukan Lain Oleh Pemda Atas Berbagai Pertimbangan Non Fisik)				
	1. Nilai Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi kawasan terletak pada fungsi strategis kawasan /wilayah 	5	

		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah 	1	
	2. Kepadatan penduduk	<p>Untuk Kota Metro & Kota Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada kawasan /wilayah sebesar >750 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada kawasan /wilayah sebesar 401 - 749 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada kawasan /wilayah sebesar >400 Jiwa/H 	5 3 1	
	3. Potensi Sosial Ekonomi	<p>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan 	5	
	4. Dukungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi Komitmen penanganan oleh pemda rendah 	5 1	
	5. Komitmen Pemda	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Penanganan Oleh Pemerintah Daerah Tinggi Komitmen Penanganan Oleh Pemerintah Daerah Rendah 	5 1	
C. Identifikasi Legalitas Lahan				
	1. Status Tanah	<ul style="list-style-type: none"> semua lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan 	+1 -1	

	2. Kesesuaian RTR	<ul style="list-style-type: none"> • semua Lokasi Berada Pada Zona Permukiman Sesuai Rencana Tata Ruang (Sesuai) • Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona 	1 -1	
	3. Persy Adm Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi 	-1	

Sumber: Teori Tommy Firman (1966). Draft Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum

7) Formula Penilaian

Berdasarkan Formula Kriteria dan Indikator tersebut, maka dapat dirumuskan Formula Penilaian (Skoring) sebagai berikut.

Tabel 3. 3. Tahapan Pembobotan

1.	Tingkat Kekumuhan	= Total Nilai A
2.	Pertimbangan Lain	= Total Nilai B
3.	Legalitas Lahan	= Total Nilai C

Sumber: Draft Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 3. 4. Hasil Pembobotan

Nilai	Keterangan
Tingkat Kekumuhan (Total Nilai A)	
15 – 34	Kumuh Ringan
35 – 54	Kumuh Sedang

55 – 75	Kumuh Berat
Pertimbangan Lain (Total Nilai B)	
5 – 11	Pertimbangan Lain Rendah
12 – 18	Pertimbangan Lain Sedang
19 – 25	Pertimbangan Lain Tinggi
Legalitas Lahan (Total Nilai C)	
(+)	Status Lahan Legal
(-)	Status Lahan Tidak Legal
Jumlah	

Sumber: Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum

3.6. Analisis SWOT

Untuk menjawab rumusan masalah kedua bagaimana strategi penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Pancor, metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT.

Hasil kegiatan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor dalam rangka merumuskan strategi yang berkaitan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis tentang Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) yang terdapat pada lokasi penelitian yang menjadi sasaran bagaimana strategi penanganan kawasan kumuh di permukiman. Melalui analisis ini akan dirancang beberapa strategi pengembangan dengan memanfaatkan berbagai kekuatan (S) dan kesempatan (O), serta berusaha untuk memperkecil kelemahan (W) dan ancaman (T) yang ada sehingga pengembangan yang akan dilakukan dapat berjalan secara optimal.

Elemen kekuatan (S) dan elemen peluang (O) dikompilasikan dalam merancang strategi alternatif. Dengan menggunakan elemen kekuatan (S) maka dirancang pula strategi untuk mengeliminasi elemen ancaman (T) yang sedang dan/atau akan dihadapi. Elemen peluang (O) digunakan untuk menyusun strategi dalam menghadapi kelemahan (W) dan ancaman (T) yang terkandung dalam faktor internal dan eksternal.

Tabel 3. 5. Variabel dan Indikator Penanganan Kawasan Kumuh dengan Menggunakan

Internal Eksternal	STRENGTH (S) Tuliskan daftar kekuatan	WEAKNESS (W) Tuliskan daftar kelemahan
OPPORTUNITY (O) Tuliskan daftar peluang	STRATEGI S-O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
THREATS (T) Tuliskan daftar ancaman	STRATEGI S-T Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	STRATEGI W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancama

Matriks SWOT terdiri atas sembilan sel. Seperti ditunjukkan, ada empat sel faktor kunci, empat sel strategi, dan satu sel yang selalu dibiarkan kosong (sel di kiri atas). Empat sel strategi, yang diberi nama SO, WO, ST, dan WT, dikembangkan setelah menyelesaikan empat sel faktor kunci, diberi nama S, W, O, dan T. Ada delapan langkah yang terlibat dalam membuat Matriks SWOT:

1. Membuat daftar kekuatan kunci internal kawasan permukiman
2. Membuat daftar kelemahan kunci internal kawasan permukiman

3. Membuat daftar peluang eksternal kawasan permukiman
4. Membuat daftar ancaman eksternal kawasan permukiman
5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasil Strategi SO dalam sel yang ditentukan.
6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasil Strategi WO dalam sel yang ditentukan.
7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasil Strategi ST dalam sel yang ditentukan.
8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasil Strategi WT dalam sel yang ditentukan.

Tujuan dari masing-masing alat pencocokan di Tahap 2 adalah untuk menghasilkan alternatif strategi yang layak, bukan untuk memilih strategi mana yang terbaik. Tidak semua strategi yang dikembangkan dalam Matriks SWOT akan dipilih untuk implementasi.

Kelebihan teknik analisis SWOT adalah dapat membuat suatu strategi pengembangan dan arahan pengelolaannya serta dapat menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Kelebihan teknik analisis deskriptif Kualitatif adalah Dapat mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat secara jelas.

3.7. Alur Penelitian

Pada penelitian ini isu masalah yang diangkat mengenai permukiman kumuh, isu persoalan pada permukiman tersebut menjadi masalah lama yang belum bisa diselesaikan. Itu alasan peneliti tertarik menggali dan memahami rumusan masalah yang tepat yang akan mampu menjawab keinginan peneliti.

Dengan masalah yang sudah ada dan telah diakui juga oleh pihak pemerintah mengenai permukiman kumuh, sehingga peneliti memutuskan judul penelitian bagaimana strategi penanganan kawasan kumuh permukiman yang lokasi penelitiannya di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.

Sebelum peneliti merumuskan bagaimana strategi yang tepat untuk menangani kawasan kumuh, pada penelitian ini akan memastikan tahapan-tahapan yang perlu di

lakukan, dari mengkaji kondisi lokasi, pengolahan data dan analisis data untuk mengetahui bagaimana tingkat kekumuhan kawasan yang akan di jadikan prioritas penanganan.



Gambar 3. 1. Alur Penelitian

